

KLIPING BERITA

RABU, 20 APRIL 2022

KLIPING BERITA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Singgalang



RANPERDA
Ketua DPRD Mardiansyah menyerahkan Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang telah disahkan jadi perda kepada Walikota Fadly Amran, Senin (18/4) di gedung DPRD setempat. (Kominfo)

Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Disetujui DPRD

PD. PANJANG - SINGGALANG

DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang Panjang tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam sidang paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (18/4).

Hal itu disepakati setelah enam fraksi memberikan pendapat akhir fraksinya yang dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan antara Pemko dan DPRD. Walikota H. Fadly Amran Datuak Paduko Malano dan Sekdako Sonny Budaya Putra, dari Pemko. Sementara dari DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD Mardiansyah, Wakil Ketua Yulius Kaisar dan Imbral.

Fraksi PAN dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Zulfikri menekankan Ranperda ini

ketika sudah disahkan, bukan hanya menjadi peraturan, namun harus bermanfaat buat cadangan pangan masyarakat.

"Kami juga memberikan saran adanya upaya pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan produksi oleh para petani," ujarnya.

Selanjutnya, adanya sistem atau pola produksi yang akan diterapkan. Mulai dari sistem pembelian dari produsen petani sampai pada penyimpanan, serta pengolahan. Alur distribusi jika terjadi krisis pangan, dapat disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah. "Bulog harus membuka ruang bagi petani lokal, jika harga jual sesuai dengan harga standar," katanya.

Adapun pendapat akhir Fraksi Gerindra yang dibacakan Riza Aditya Nugraha meminta pemerintah daerah mempersiapkan ketentuan-ketentuan ketahanan cadangan pangan tersebut secara bertahap. Sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif yang sama-sama tidak diharapkan.

"Kami Fraksi Gerindra me-

ningkatkan kepada Saudara Walikota bahwa ranperda ini juga sangat diharapkan akan membantu meningkatkan perekonomian petani-petani lokal," sebutnya.

Pendapat akhir Fraksi Nasdem yang dibacakan Imbral mengatakan, setelah pihaknya mengikuti pembahasan ranperda catur wulan I tahun 2022 yang dibahas bersama Tim Penyusun Ranperda dan OPD, pihaknya memahami.

"Untuk itu, kami dari Fraksi Nasdem setuju ranperda ini dijadikan perda dan diharapkan ranperda ini nanti setelah menjadi perda agar dapat dijalankan secara maksimal," katanya.

Sementara itu, pendapat akhir Fraksi Golongan Karya yang dibacakan Yovan Fadayan Remindo mengharapkan Pemerintah Daerah dapat memperhatikan aspek ketahanan pangan yang diatur. Seperti pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan menanggulangi kerawanan pangan, keadaan darurat dan pascabencana

na dengan tetap memperhatikan mutu dan kualitas pangan.

Pendapat akhir Fraksi PBB-PKS yang dibacakan Adityawarman mengatakan, menyetujui ranperda ini. Akan tetapi ada beberapa catatan diantaranya memastikan kepada Pemerintah Daerah bahwa perda ini bisa menjamin tidak akan terjadinya kekurangan stok pangan, pengendalian harga pasar yang membebani masyarakat, adanya kondisional bencana alam atau sosial serta keadaan darurat lainnya yang membuat ketersediaan pangan terganggu.

Kemudian, pendapat akhir Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang dibacakan Puji Hastuti menyampaikan agar Pemerintah Daerah menyosialisasikan perda ini sehingga masyarakat paham dan mengerti tujuan dari pembuatan perda tersebut. "Sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan tidak menuntut di kemudian hari. Bulog tetap membuka ruang bagi petani lokal jika harga jual sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 10.550/kg," ungkapnya. (205)



BERSAMA - Sebanyak 14 siswa pandai tahfiz Quran selama Pesantren Ramadan bersama Kepala MTsN 3 Padang Pariaman Salwina dan guru-guru, pada penutupan Pesantren Ramadhan, di Mushala MTsN 3 Padang Pariaman, Kamis (14/4). (awati pilang)

Palito Tuo Santuni 27 Orang Anak Yatim

PADANG PANJANG - Para pensiunan di lingkungan Pemko Padangpanjang yang berhimpun dalam wadah organisasi Palito Tuo, menyerahkan santunan untuk 27 orang anak yatim berusia 17 tahun ke bawah.

Ketua Palito Tuo H. Syamsurizal didampingi Humas Ananda Utama, Selasa (19/4) mengatakan, pemberian santunan itu ditujukan kepada anak yatim yang merupakan putra-putri PNS/ASN yang sudah meninggal dunia, sebagai upaya menggembarakan mereka, dalam menunaikan ibadah puasa dan menyambut lebaran.

"Penyerahan santunan kita lakukan di Masjid Khalisah Kampung Baru Silaing Bawah. Ini merupakan tanggung jawab sosial kita terhadap anak-anak rekan kita yang sudah meninggal," sebutnya dengan penegasan, almarhum orang tua anak yatim dan yatim piatu penerima santunan berasal dari keluarga besar PNS, ASN, dan pegawai BUMN/BUMD yang bertugas di Padang Panjang.

Sementara itu, Sekretaris Palito Tuo Syahril Lubas menjelaskan, dana santunan yang dibagi-bagikan itu jumlahnya Rp14.850.000 berasal dari dana kas sosial, dan infak spontan pensiunan. Setiap anak menerima santunan Rp550 ribu. Pemberian bantuan saat ini, ujarnya, merupakan yang keempat kalinya sejak organisasi eksis.

Palito Tuo adalah grup pensiunan yang anggotanya tidak saja berasal dari lingkungan Pemko Padangpanjang, tetapi juga pensiunan TNI, Polri, dan pegawai BUMN/BUMD yang pernah bertugas di Padangpanjang. Saat ini dipimpin Ketua Syamsurizal, Sekretaris Syahril Lubas, dan anggota-anggota pimpinan Ananda Utama, Nursian Tayan, Ratna Trikasih, Rusli, Faisal, Syafruddin Agus, dan lain-lain.

Sebelumnya, Palito Tuo juga sudah menggelar kegiatan berbuka bersama. Kegiatan itu turut dihadiri mantan Wakil Walikota Padangpanjang Adirozal beserta istri. Saat ini, Adi menjadi Bupati Kerinci periode kedua.(211)



SANTUNAN-Pengurus dan anggota Palito Tuo, Kota Padang Panjang, foto bersama anak yatim, usai menyerahkan santunan. (musriadi musanif)

Walikota Luncurkan Dapur Sehat Atasi Stunting

Padang Panjang, Singgalang

Guna mengatasi permasalahan stunting, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBP) Kota Padang Panjang meluncurkan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), Senin (18/4) di aula kantor Camat Padang Panjang Timur.

Dashat ini diresmikan Walikota H. Fadly Amran Datuak Paduko Malano, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati, Sekdako Sonny Budaya Putra, Ketua TP-PKK, dr. Dian Puspita Fadly Amran, dan Kepala DSPPKBP-PPA Osman Bin Nur.

"Ini penting dan perlu perhatian, bagaimana stunting ini bisa turun melalui program Dashat dan pemberdayaan masyarakat serta pendidikan kepada keluarga yang di ambang stunting," kata walikota dalam sambutannya.

Wako Fadly juga meminta dinas terkait bisa terus berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar agar

anak-anaknya bisa terhindar dari stunting. Salah satunya dengan pemberian gizi yang cukup kepada anak.

Di kesempatan yang sama, Fatmawati menyampaikan, dengan adanya Dashat ini diharapkan sinergitas, kolaborasi, dan komitmen bersama yang sudah dilahirkan tidak putus dan tetap berkelanjutan, sehingga upaya dan ikhtiar yang baik ini bisa dirasakan manfaatnya.

"Dengan kekuatan bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat wilayah terkecil ikut bersama-sama berupaya percepatan penurunan stunting. Ini supaya angka 14% di tahun 2024 bisa kita capai. Bahkan kita berharap bisa mengentaskan stunting ini di bawah 10% untuk Kota Padang Panjang," ucapnya.

Sementara itu, Osman menjelaskan, Dashat ini terletak pada Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan menjadi pusat gizi serta pelayanan pada anak stunting.

BKKBN dan ahli gizi telah

menyusun menu sehat dengan konsep produk lokal guna memenuhi gizi seimbang.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kegiatan Dashat mencakup edukasi perbaikan gizi dan konsumsi pangan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

"Dalam hal ini masyarakat akan diberi sosialisasi terkait pangan lokal yang terjangkau,

bercita rasa dan bergizi. Dan dipadukan dengan kegiatan keimanan lainnya," terangnya.

Dalam kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pemberian alat teknologi tepat guna (TTG) kepada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) untuk mendukung Dashat dari kepala Perwakilan BKKBN Sumbar. (205)



Nama Media : Harian Singgalang



SERAHKAN

Walikota H Fadly Amran didampingi Ketua Baznas Syamsuarni dan pejabat lain menyerahkan paket sembako dari baznas bagi warga kurang mampu di gedung M Syafei, Senin (18/4). (Kominfo)

Baznas Salurkan 180 Paket Sembako dan Gelar Khitanan Gratis

PD. PANJANG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang menyalurkan sembako sebanyak 180 paket untuk fakir dan miskin yang ada di Kota Padang Panjang. Bantuan itu diserahkan secara simbolis Walikota H Fadly Amran saat Pembukaan Pasar Murah Ramadhan 1443 H di Gedung M. Syafei, Senin (18/4).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Baznas yang terus membantu masyarakat mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program yang sudah dibentuk.

Warga yang menerima ini merupakan masyarakat yang memang layak dan sesuai dengan syariat dan prosedur yang ada di Baznas," ujar Wako Fadly saat memberikan sambutan.

Ketua Baznas Syamsuarni menyebutkan, paket sembako berisikan minyak goreng, beras dan gula, dengan total harga senilai Rp200.000. Sembako disalurkan melalui kelurahan masing-masing, dengan harapan bisa membantu perekonomian masyarakat yang sudah turun selama masa pandemi Covid-19.

"Kami berharap bantuan ini akan membantu meringankan beban warga miskin menghadapi lebaran. Program ini terselenggara atas kerjasama Baznas dengan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mensejahterakan umat," ujarnya.

Baznas Kota Padang Panjang juga kembali menggelar khitanan massal untuk keluarga tidak mampu, mulai Senin (18/4) di rumah praktek dr Mawardi, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur.

Syamsuarni menyebutkan, khitanan massal ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar Baznas sejak tahun 2015 lalu, dan ini merupakan tahun kedelapan pelaksanaannya.

"Tahun ini kita kembali menggelar khitanan massal seperti biasa, setiap bulan puasa. Khitanan massal untuk tahun ini akan berlangsung mulai hari ini sampai 21 April mendatang. Sehari, sebanyak 20 anak akan dikhitan oleh Dokter Mawardi ini," ucapnya.

Dikatakannya, saat ini ada 97 anak yang telah terdaftar dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu sampai akhir pelaksanaan nanti.

Pihaknya berharap, kegiatan ini dapat membantu meringankan beban warga yang kurang mampu untuk mengkhitan anaknya.

"Mudah-mudahan bisa terbantu masyarakat kita di tengah kondisi sekarang yang belum stabil pasca pandemi. Semoga kedepan, semakin meningkat kepedulian masyarakat, terutama golongan Muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Padang Panjang, karena melalui zakat ini banyak yang bisa dijangkau," harapnya.

Sekretaris Baznas H Rafles Sama menambahkan, yang dikhitan secara gratis ini merupakan warga kurang mampu yang telah terdaftar ataupun yang diusulkan pihak sekolahnya masing-masing.

"Selain khitanannya gratis, ada bingkisan berupa kain sarung, baju koko dan uang saku bagi anak yang dikhitan ini," ucapnya sambil mengucapkan terimakasih kepada para donatur, salah satunya Bank Nagari Syariah. (205)

Pemko Padang Panjang Gelar Pasar Murah Ramadhan

PADANG PANJANG - SINGGALANG

Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) menggelar Pasar Murah Ramadhan 1443 H, Senin-Selasa (18-19) di gedung M. Syafei. Kegiatan yang ditujukan untuk membantu warga jelang lebaran ini dibuka Walikota H Fadly Amran Datuak Paduko Malano.

Wako Fadly mengucapkan terima kasih kepada Disperindagkop UKM yang sudah mempersiapkan kegiatan Pasar Murah ini, dan juga kepada distributor yang sudah memberikan harga di bawah harga pasaran.

"Kami sangat berterima kasih juga kepada semua elemen yang terlibat, dan memberikan sedekah untuk terselenggaranya Pasar Murah ini sehingga harga yang dijual lebih murah dari harga pasarnya," ujar Fadly.

Fadly menyebutkan, kolaborasi dan dukungan dari semua pihak ini harus terus digerakkan di Kota Padang Panjang, demi terbantunya warga yang membutuhkan. "Ini kolaborasi dan gerakan yang luar biasa. Tanpa dana APBD, tapi kita bisa membantu warga," tandasnya.

Sementara itu Kepala Disperindagkop UKM, Jevie C Eka Putra menyampaikan, Pasar Murah ini hadir selama dua hari, namun jika dibutuhkan akan dilakukan perpanjangan hari sampai dengan tiga hari kedepan.

"Jika ini dibutuhkan, akan kita lakukan perpanjangan dua sampai tiga hari kedepan. Me-

ingat animo masyarakat yang sangat luar biasa dalam membeli kebutuhan pokoknya," tuturnya.

Ia berharap dengan adanya Pasar Murah Ramadhan ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan harga lebih murah dalam kebutuhan pokok.

Gerakan Koperasi Berbagi ikut mendukung penyelenggaraan Pasar Murah Ramadhan itu dengan cara menyebarkan kupon kepada masyarakat untuk berbelanja di Pasar Murah. Kupon seharga Rp5.000 ini dibagikan kepada masyarakat dengan data didapatkan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBP-PPA).

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Rini Lisdayani menjelaskan, pada kegiatan subsidi di Pasar Murah, koperasi ikut serta dengan mengeluarkan dana pembangunan daerah kerja di masing-masing koperasi. Kupon ini bisa digunakan masyarakat untuk mendapatkan potongan harga di Pasar Murah.

"Setiap masyarakat yang memiliki kupon akan mendapat-

kan potongan harga berdasarkan jumlah kupon yang akan ditukarkan. Ada yang dapat dua, tiga atau empat," ujarnya.

Sebanyak 20 koperasi yang ikut dalam Gerakan Koperasi Berbagi II ini diantaranya KPRI Serambi Mekkah, KPRI Syariah As Salam SMA 2, KPN Sehat, KPN MTsN, KPN Syariah Balai Kota, KPN RSUD, Kopwan Melati, KSU SMKN 2, KPN SMA 1, KPN SMP 2, KSPPS Kopesda, KPRI Syiah SMP 1, Kospondren Diniyyah Puteri, Kopkar Syariah Yarsi, KPN Koprada, KPN SMK 1, Koppas AIPT, KSP PS Hidup Berkah Bermakna, KPN Karyatama, KPN SMP 4.

Selain koperasi memberikan kupon, UMKM yang ikut berpartisipasi dalam Pasar Murah juga memberikan harga di bawah harga jual pasaran biasa.

Ikut hadir dalam pembukaan Pasar Murah ini Ketua Dekranasda dr Dian Puspita Fadly Amran, Ketua GOW Ny Nova Era Yhanty Asrul, Ketua Baznas Syamsuarni, Kepala DSPPKBP-PPA Osman Bin Nur, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, Pengurus DWP Disperindagkop, serta pimpinan koperasi se-Padang Panjang. (205)

Pasar Murah ini merupakan dukungan dan kolaborasi dari Disperindagkop UKM dengan beberapa elemen seperti Bulog, Bank Nagari, AB Mart, Dharma Wanita Disperindagkop dan Gerakan Koperasi Padang Panjang. Komoditi barang kebutuhan pokok yang dijual berupa beras, minyak goreng kemasan, gula, tepung terigu kemasan, produk UMKM dan beberapa kebutuhan saat lebaran nanti.



Nama Media : Harian Posmetro Padang

Wako Fadly Amran

Kepala OPD harus Jalin Komunikasi Baik dengan Wartawan

PDG.PANJANG, METRO

Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meminta kepala OPD menjalin komunikasi yang baik dengan wartawan. Bila wartawan membutuhkan informasi, kepala dinas wajib menjelaskannya. "Saya tidak ingin ada kepala dinas yang absen dari wartawan," ujar Wako Fadly, seraya menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan Rapat Forum Satu Data, Selasa (19/4) di Aula Lantai III Balai Kota.



FADLY AMRAN

"Kepala dinas diminta jangan menghindar, meskipun wartawan mengkritik

suatu kesalahan atau kasus. Itulah tugas mereka, yang penting bukan mencari-cari masalah, karena itu beda lagi," ujarnya.

Di samping itu, agar berbagai informasi dapat diakses oleh wartawan, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mesti dimaksimalkan di setiap OPD.

"PPID ini penting sehingga tidak ada prasarana dari wartawan. Jadi bila ada halangan saat diwawancara, PPID ini bisa menjadi corong," ungkap wali kota muda ini.(rmd)



Nama Media : Harian Haluan

Baznas Gelar Khitanan Massal untuk Anak Keluarga Tidak Mampu

PADANG PANJANG, HALUAN — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang kembali menggelar khitanan massal untuk anak dari keluarga tidak mampu. Program tersebut disambut dengan animo tinggi dari masyarakat.

Ketua Baznas, Syamsuarni menyebutkan khitanan massal ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar Baznas sejak tahun 2015 lalu, dan ini merupakan tahun kedelapan pelaksanaannya.

“Tahun ini kita kembali menggelar khitanan massal seperti biasa, setiap bulan puasa. Khitanan massal untuk tahun ini akan berlangsung mulai hari ini sampai 21 April mendatang. Sehari, sebanyak 20 anak akan dikhitan oleh Dokter Mawardi ini,” ucapnya.

Syamsuarni mengatakan, saat ini ada 97 anak yang telah terdaftar dan diperkirakan akan

bertambah jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu sampai akhir pelaksanaan nanti. Pihaknya berharap, kegiatan ini dapat membantu meringankan beban warga yang kurang mampu untuk mengkhitan anaknya.

“Mudah-mudahan bisa terbantu masyarakat kita di tengah kondisi sekarang yang belum stabil pascapandemi. Semoga kedepan, semakin meningkat kepedulian masyarakat, terutama golongan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Padang Panjang. Karena melalui zakat ini banyak yang bisa dijangkau,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Baznas Rafles Sama, menjelaskan program khitan gratis tersebut dikhususkan untuk anak dari warga kurang mampu yang telah terdaftar ataupun yang diusulkan pihak sekolahnya masing-masing. (h/pis)



SALAH seorang peserta khitan massal Baznas Padang Panjang, Selasa (18/4). APIZRAJOALAM



Nama Media : Harian Rakyat Sumbar



WALIKOTA Padangpanjang Fadly Amran saat memimpin Rapat Forum Satu Data di Balaikota Padangpanjang.

Kepala OPD Jangan Alergi Terhadap Wartawan

Fadly Amran : Jangan Menghindar, Meskipun Dikritik

JON KENEDI

Harian Rakyat Sumbar

Walikota Padangpanjang Fadly Amran meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak alergi dengan wartawan dan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan wartawan.

"BILA wartawan membutuhkan informasi, kepala dinas wajib menjelaskannya. Saya tidak ingin ada kepala dinas yang absen dari wartawan," ujar Fadly, seraya

menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan Rapat Forum Satu Data, Selasa (19/4) di Aula Lantai III Balaikota.

"Kepala dinas diminta jangan menghindar, meskipun wartawan mengkritik suatu kesalahan atau kasus. Itulah tugas mereka, yang penting bukan mencari-cari masalah, karena itu beda lagi," ujarnya.

Disamping itu, agar berbagai informasi dapat diakses oleh wartawan, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mesti dimaksimalkan di setiap OPD.

"PPID ini penting sehingga tidak ada prasangka dari wartawan. Jadi bila ada halangan saat diwawancarai, PPID ini bisa menjadi corong,"

ungkap wali kota muda ini.

Selain itu, Walikota juga menekan setiap OPD mesti memiliki data-data penting guna mendukung pencapaian target pembangunan yang ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun pemerintah pusat.

"Apa data-data yang penting, misalkan di Dinas Kesehatan soal stunting, berapa uang yang dianggarkan untuk lansia. Berbicara statistik perhatian pemerintah, tentu melihat angka-angka naik turunnya," ujar Fadly.

Penyusunan data secara

teknis, lanjut Fadly, di antaranya berdasarkan kepala indikator, variabel, dan kegiatan. "Secara teknis, ketiganya ini harus paham juga," katanya.

Dikatakannya lagi, mencapai hasil suatu kinerja bukan terpaku pada outcome saja. "Outcome itu hanya hasil akhir, tapi bagaimana prosesnya," tuturnya.

Rapat turut dihadiri, Sekdako Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Kepala BPS, Arius Jonnaidi, M.E, Kepala Dinas Kominfo, Drs. Ampera, S.H, M.Si, Kepala Bappeda Rusdianto, S.IP, M.M, dan pejabat terkait lainnya. (ned)



Nama Media : Harian Rakyat Sumbar

Masyarakat Cubadak Air Rasakan Manfaat Dana Desa

Harapkan Dukungan Anggota DPD-RI Terhadap Pasar dan Pariwisata

JON KENNEDI

Harian Rakyat Sumbar

Kepala Desa dan perangkatnya mengharapkan dukungan Anggota DPD RI terhadap rencana pengembangan pasar dan pariwisata di daerah itu. Ini mengemuka dalam pertemuan di kantor desa itu, Selasa (19/4).

"Masyarakat sebenarnya merasakan manfaat dana desa, dimana di masa Covid-19 masyarakat mendapatkan BLT Dana Desa. Namun mereka umumnya lebih mengharapkan terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di mereka," ujar Kepala Desa Cubadak Air, Sabar Ali.

Harapan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat agar pasar direnovasi. Pasar ini sudah terasak tak memadam lagi, kecil dan hanya berupa los. Pasar jadi penuh sesak hingga kurang nyaman dan mengganggu arus lalu lintas.

"Telah kami upayakan melalui Musrenbang hingga ke tingkat kota, tapi belum ada realisasinya hingga kini," ungkap Sabar Ali.

Kondisi yang sama juga dirasakan ketika ingin mengembangkan potensi wisata air di Bendungan Batang Mangguang. Ada keinginan menjadikannya kawasan wisata air, pemandian, dan mancing.

Jika dikembangkan jadi wisata pemandian, maka di kiri dan kanan bendungan harus dibuat talud dan jalan inspeksi. Ini tentu saja tidak bisa dilakukan dengan dana desa.

Tak hanya itu, di sektor wisata Desa Cubadak Air ingin

menjadikan areal persawahan sebagai wisata alam. Lokasi wisata alam ini disandingkan dengan wisata kuliner.

"Sepanjang jalan Cubadak air ini dibuat wisata kuliner, dan areal persawahan dijadikan tempat main dan ada pondok-pondoknya. Ada wisata mancing ikan dan belut juga," ungkap Sabar.

Dia juga mengatakan bangunan kantor desanya. Kondisi kantor saat ini perlu dilanjutkan pembangunannya agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ditegaskan Sabar, desa sulit merealisasikan harapan masyarakat tersebut, karena dana desa yang biasanya di atas Rp1 miliar kini hanya diterima Rp674.002.000. Sebanyak 68 persen habis untuk BLT Dana Desa (40 persen), ketahanan pangan dan hewan (20 persen), serta penanganan Covid-19 (8 persen). BLT Dana Desa diberikan kepada 75 kepala keluarga.

"Sulit melakukan pembangunan fisik. Untuk kantor ti-

dak bisa pula digunakan alokasi dana desa (ADD) karena sudah terpakai untuk siltap dan operasional," ujarnya.

Menanggapi pemaparan Kepala Desa, Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan penggunaan dana desa telah diatur dalam Perpres No. 104 tahun 2021. Penggunaan dana desa harus mengacu pada aturan tersebut. Akibatnya tentu kepala desa tidak dapat menaikan janji semasa kampanye Pilkadaes lalu.

"Terpenting saat ini warga Pak Kades tidak ada lagi yang tidak menerima bantuan pemerintah apakah BLT Dana Desa, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT)," ujar Leonardy.

Untuk pengembangan pariwisata, kata Leonardy, memang perlu kita dorong. Pariwisata bila dikelola dengan baik maka bisa menjadi pemasukan bagi desa.

"Untuk bendungan, yang berwenang adalah Di-

nas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Buat perencanaan dan ajukan permohonan kepada dinas tersebut. Kita dorong bersama," kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI.

Sementara untuk pasar, dan wisata alam atau wisata kuliner, Kepala Desa disarankan untuk memperjuangkan dalam Musrenbang, membuat permohonan ke dinas hingga kementerian terkait.

"Kepala Desa hendaknya juga memanfaatkan jalur anggota DPRD Kota Pariaman yang anak asli desa atau dipilnya di Cubadak Air ini. Manfaatkan seluruh lini dan tinggal menunggu mana yang cepat terealisasi nantinya," tegasnya.

Namun dia mengingatkan, setiap membuat permohonan, hendaknya disertai dengan perencanaan, jelas anggaran yang dibutuhkan serta hal lain yang mendukung agar permohonan tersebut cepat mendapat persetujuan. (ned)

DPRD Minta Walikota Evaluasi Kinerja OPD

Guguk Malintang, Rakyat Sumbar—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2021, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md, Senin (18/4). Dibacakan Anggota DPRD, Nasrul Effendi, diantara rekomendasi tersebut

adalah agar adanya monitoring dari Walikota pada setiap program kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD. Sehingga program kegiatan tersebut terlaksana secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, DPRD meminta antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjalin koordinasi yang baik.

"Kami minta kepada perangkat daerah agar dapat saling berkerja sama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada," kata Nasrul.

Kemudian DPRD menyampaikan, walikota dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur yang ditempatkan pada Bagian Pengadaan Barang Jasa, agar pemenang tender memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan proyek yang dimengukannya. Sehingga tidak terjadi proyek mangkrak dan bermasalah.

"Oleh karena itu penting kiranya saudara Walikota menerbitkan peraturan yang menunjang agar setiap tender proyek yang dilaksanakan menghasilkan pemenang yang berkualitas," sebutnya.

DPRD juga meminta adanya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi. "Hal ini harus menjadi catatan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini BPKD harus bisa mencari sumber-sumber pendapatan baru," ujarnya.

Sementara itu, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, BPKD harus lebih tegas melakukan pemungutan terhadap wajib pajak.

"Untuk belanja hibah kami minta agar pencapaian realisasinya minimal 95% dari yang dianggarkan. Karena belanja hibah adalah belanja yang telah diverifikasi OPD berdasarkan proposal yang diajukan calon penerima hibah," sebutnya.

Seterusnya, wali kota diminta mempercepat pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah milik pemerintah daerah yang belum disertifikasi.

"Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan OPD terkait, serta akan dikawal masing-masing komisaris DPRD," ungkapnya.

Menanggapi rekomendasi DPRD, Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mengatakan, akan menindaklanjuti.

"Insya Allah rekomendasi tersebut langsung didengarkan Bapak Sekda, pimpinan OPD, dan jajaran untuk langsung di-follow up," tuturnya.

Turut hadir, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemko, pimpinan BUMD dan undangan lainnya. (ned)

Puluhan Jamaah Masjid Babussalam Dibantu Baznas

Bukti Surungan, Rakyat Sumbar—Pengurus Masjid Babussalam Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padangpanjang Barat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangpanjang distribusikan sebanyak 60 paket bantuan Program Padangpanjang Peduli bagi jamaah di masjid ini.

Wakil Ketua II Baznas, Syaiful Ardi menyebutkan, kegiatan ini merupakan program kolaborasi yang pertama dilakukan Baznas Kota Padangpanjang bersama dengan pengurus masjid.

"Ini pertama kalinya di Padangpanjang pengurus masjid bekerja sama dengan Baznas. Alhamdulillah dari pengurus Masjid Babussalam ini kita kelola bersama, mereka ada infak dari warga, lalu kita tambah dengan dana yang ada di kita sesuai dengan peruntukannya," sebutnya.

Pihaknya berterima kasih kepada pengurus Masjid Babussalam yang sudah me-



PENYERAHAN Bantuan Baznas Kota Padangpanjang kepada jamaah Majlis Babussalam Bukit Surungan.

mulai kegiatan kolaborasi ini. Ia berharap semoga ini dapat menjadi contoh sekaligus rujukan bagi pengurus masjid yang lain untuk melakukan hal yang serupa.

"Dengan bantuan pengurus masjid tentu pencapaiannya lebih maksimal, sehingga memang terjangkau kepada jamaah kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan

ini bisa menjadi kabar gembira bagi warga kita dan kepada para pemberi infak serta donasi. Semoga ini bisa dapat bernilai pahala disisi Allah SWT," ucapnya.

Sementara itu Ketua Pengurus Masjid, H. Salmi mengucapkan terima kasih karena telah dapat bekerja sama dengan Baznas memberikan santunan untuk warga

yang membutuhkan saat ini.

"Di program Padangpanjang Peduli ini, kita membagikan beras sebanyak 20 kg, lalu minyak goreng kemasan isi 2 liter untuk 60 orang penerima di Kelurahan Bukit Surungan," katanya.

Ia mengungkapkan, dana ini berasal dari dana infak Masjid Babussalam Terminal Bukit Surungan ditam-

bah dana dari Baznas.

Camat Padangpanjang Barat Fiori Agustin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus masjid yang telah berkolaborasi dengan Baznas.

"Kita berharap program baik ini bisa tetap dilaksanakan dan berkesinambungan di Masjid Babussalam. Kita juga berharap program kolaborasi ini juga bisa dilaksanakan di Masjid dan Musalla lainnya di Kelurahan Bukit Surungan dan juga di Kecamatan Padangpanjang Barat pada umumnya," tuturnya.

Fiori juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan infaknya di masjid ini dan telah dikelola dengan baik oleh pengurus.

"Ibu dan bapak yang menerima bantuan ini, semoga dapat meringankan bebannya," harapnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Lurah Bukit Surungan, Ryan Afrinaldi, A.Md beserta pengurus Baznas. (ned)



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Rakyat Sumbar



PENGURUS Palito Tuo usai penyerahan santunan kepada anak yatim piatu di Masjid Ummul Khalisah Kampung Baru Kelurahan Silaing Atas.

Palito Tuo, Serahkan Santunan Anak Yatim dan Berbuka Puasa

Padangpanjang, Rakyat Sumbar—Setelah menyerahkan santunan untuk anak yatim dan yatim piatu, keluarga besar Palito Tuo Kota Padangpanjang, menggelar berbuka puasa bersama, di kuliner Silaing Bawah, Minggu (17/4).

Santunan, yang diserahkan senilai Rp14,8 juta lebih, kepada 27 orang anak yatim dan yatim piatu berumur dibawah 17 tahun, yang orangtuanya sudah meninggal berasal dari ASN.

Menurut Ketua Palito Tuo Padang-

panjang H.Syamsurizal, santunan yang diserahkan untuk anak yatim piatu di masjid Ummul Khalisah Kampung Baru Silaing Atas, sebagai rasa kasih sayang pensiunan berbagi kepada anak dari PNS, ASN, BUMN dan BUMD yang orang tuanya sudah meninggal.

"Jadi, sebagai orang pensiunan, merasa terpanggil sosialnya, terhadap anak-anak pensiunan yang orang tuanya sudah tiada, meski pemberian sebatas kemampuan, tentunya sebagai umat beragama,

menunjukkan rasa tanggungjawab," sebut Syamsurizal yang mantan sekwan itu.

Ditambahkan Sekretaris Palito Tuo Syahril Lubas, dana santunan Rp.14.850.000 yang diserahkan pada anak yatim dan yatim piatu sebanyak 27 orang, berasal dari kas sosial dan infak spontan pensiunan, setiap anak menerima santunan Rp550 ribu.

"Pemberian santunan pada anak yatim piatu ini, untuk keempat kalinya, sejak berdirinya group pensiunan PNS, ASN, TNI, Polri, BUMN dan BUMD yang diberi

nama Palito Tuo. Pada 22 November 2022 mendatrag, sudah menginjak usia lima tahunan," sebut Syahril diakui Humas Ananda Utama, Nursian Tayan, Ratna Tri-kasih, Rusli, Faisal dan Syafriddin Agus.

Berbuka Puasa Bersama

Usai penyerahan santunan, dilanjutkan berbuka puasa bersama, diikuti puluhan keluarga pensiunan, di Kuliner Silaing Bawah. Juga dihadiri mantan Wakil Walikota Padangpanjang yang saat ini menjabat Bupati Kerinci Adirozal didam-

ping Ny. Husnaily Husna.

Menurut salah seorang pensiunan PNS Kota Padangpanjang Ratna Tri Kasih didampingi Faisal Gucci mengaku salut pada pak Adirozal, yang pandai berbagi, peduli, sebagai magmit penyemangat pensiunan Padangpanjang.

"Sejatinya buya itu, menyempatkan diri shalat tarawih dan memberikan tauziah dihadapan jamaah masjid Nurul Huda Silaing Bawah, yangakhirini memiliki ciri khas program sosial pembinaan umat," sebutnya. (ned)



Nama Media : Harian Khazanah



Parlementaria
DPRD Padang Panjang

REKOMENDASI DPRD PADANG PANJANG TERHADAP LKPJ WALIKOTA TA 2021

Kinerja OPD Jadi Sorotan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Padang Panjang, Mardiansyah, A.Md, Senin (18/4).

Dibacakan Anggota DPRD, Nasrul Effendi, di antara rekomendasi tersebut agar adanya monitoring dari walikota pada setiap program kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD. Sehingga program kegiatan tersebut terlaksana secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, DPRD meminta antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjalin koordinasi yang baik.

"Kami minta kepada perangkat daerah agar dapat saling berkerja sama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada," kata Nasrul.

Kemudian DPRD menyampaikan, walikota dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur yang ditempatkan pada Bagian Pengadaan Barang Jasa, agar pemenang tender memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan proyek yang dimenangkannya. Sehingga tidak terjadi proyek mangkrak dan bermasalah.

DPRD juga menilai adanya kegagalan walikota dalam melaksanakan program strategis yang telah dicanangkan, seperti pembuatan Tourist Information Center (TIC) dengan anggaran sebesar lebih kurang Rp500 juta, pembangunan pedestrian kawasan pasar dengan anggaran lebih kurang Rp7 miliar, serta pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup (untuk pembangunan sarana olahraga). "Tentunya ini akan berdampak terhadap pembangunan sarana olahraga yang telah dianggarkan pada tahun 2022," tegasnya.

Untuk itu Walikota diminta untuk melakukan evaluasi khusus



KETUA DPRD Padang Panjang, Mardiansyah menyerahkan rekomendasi LKPJ Walikota 2021 kepada Walikota Fadyly Amran, disaksikan Wakil Ketua DPRD, Imbral dan Yulius Kaiser. **IST**

terhadap kinerja aparatur yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud. Dan kepada walikota agar dapat melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap program strategis yang telah dicanangkan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur.

"Disamping itu, penting kiranya walikota menerbitkan peraturan yang menunjang agar setiap tender proyek yang dilaksanakan menghasilkan pemenang yang berkualitas," katanya.

DPRD juga meminta adanya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi. "Hal ini harus menjadi catatan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini BPKD harus bisa mencari sumber-sumber pendapatan baru," ujarnya.

Sementara itu, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, BPKD harus lebih tegas melakukan pemungutan terhadap wajib pajak.

"Untuk belanja hibah kami minta agar pencapaian realisasinya minimal 95% dari yang dianggarkan. Karena belanja hibah adalah belanja yang telah diverifikasi OPD berdasarkan proposal yang diajukan calon penerima hibah," sebutnya.

Seterusnya, walikota diminta mempercepat pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah milik pemerintah daerah yang belum disertifikatkan. "Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan OPD terkait, serta akan dikawal masing-masing komisi DPRD," ungkapnya.

Menanggapi rekomendasi DPRD, Wali Kota, H. Fadyly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mengatakan, akan menindaklanjutinya. "Insya Allah rekomendasi tersebut langsung didengarkan Bapak Sekda, pimpinan OPD, dan jajaran untuk langsung di-follow up," tuturnya. **Paulhendri**



KETUA DPRD Padang Panjang, Mardiansyah menandatangani LKPJ Walikota Padang Panjang TA 2021. **IST**



ANGGOTA Fraksi Partai Demokrat, Puji Hastuti menyerahkan rekomendasi fraksi. **IST**



ANGGOTA Fraksi Partai Gerindra, Reza Aditya menyerahkan rekomendasi fraksi. **IST**



SUASANA sidang paripurna DPRD Padang Panjang tentang rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Padang Panjang TA 2021, Senin (18/4). **IST**



Nama Media : Harian Koran Padang

Ketua PKK Padangpanjang Resmikan 'Look Beauty Store'

PADANGPANJANG, KP - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padangpanjang, Dian Puspita Fadly Amran resmikan toko kecantikan dan kosmetik 'Look Beauty Store' pertama di Kota Padangpanjang, Senin (18/4).

Toko itu bertempat di Jalan Imam Bonjol Pasar Pusat, tepatnya di samping gang masuk gapura pasar tradisional. Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita langsung oleh Dian Puspita didampingi owner Look Beauty Store, Susi Lestari.

Dalam sambutannya, Dian mengucapkan selamat atas grand launching Look Beauty Store dan berharap ke depannya warga lebih mudah mendapatkan produk untuk perawatan dan kecantikan yang dibutuhkan.

"Semoga dengan adanya Look Beauty Store ini lebih mempermudah perempuan Padangpanjang membeli produk kecantikan," ujarnya.

Kaum wanita, sebut Dian, harus bisa merawat kulit dan wajah sejak dini agar tetap tampil cantik dan sehat.

"Wajah dan kulit itu butuh perawatan. Bahkan anak kecil pun tetap kami sarankan menggunakan sunblock/sunscreen ketika hendak keluar

rumah agar wajah tidak langsung terpapar bahaya sinar matahari yang dapat menyebabkan kanker kulit," sebutnya.

Dian berharap Look Beauty Store bisa berkembang pesat dan dapat membantu perempuan Padangpanjang dalam merawat wajah dan kulit dengan menggunakan produk-produk yang tersedia di store tersebut.

Sementara, owner Look Beauty Store, Susi Lestari mengungkapkan motivasi ia membuka toko itu.

"Motivasi saya agar masyarakat khususnya perempuan, bisa lebih mudah menemukan produk kosmetik dan skincare sesuai yang dibutuhkan. Karena masih banyak yang sulit menemukan produk skincare di sini hingga harus membeli ke kota-kota besar seperti Kota Padang," ujarnya.

Sebagaimana diketahui tambahnya, masyarakat sudah sangat peduli bagaimana ia bisa terlihat cantik dan memiliki kulit sehat. Mulai dari anak remaja hingga dewasa," tuturnya. (sup)



KETUA Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padangpanjang, Dian Puspita Fadly Amran memotong pita tanda diresmikannya toko kecantikan dan kosmetik Look Beauty Store pertama di Kota Padangpanjang, Senin (18/4).



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Mingguan Padang Expo

Wako Fadly Amran Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan

Padang Expo, Padang Panjang Atas kepedulian memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap 1.261 orang perangkat RT, pekerja sosial masyarakat, tenaga kerja sukarela, pekerja sosial keagamaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada Pemko Padang Panjang

Penghargaan itu diserahkan kepada Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbang-Riau, Eko Yuyulianda kepada Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak

Paduko Malano, Senin (13/4) di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbang-Riau di Kota Pekanbaru.

Wako Fadly menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dikatakannya, salah satu bentuk keadilan sosial dan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat ialah melalui program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi



pekerja rentan. "Komitmen bersama antara Pemer-

● Selengkapnya Hal. 7

Wako Fadly Amran.....Dari Hal. 1

tah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu lebih ditingkatkan lagi agar program ini berjalan lebih optimal," kata Wako Fadly.

Tahun 2023, lanjut Fadly, Pemerintah Kota Padang Panjang akan melindungi seluruh pekerja rentan melalui program Universal Labour Coverage (ULC).

Wako meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mewujudkan program tersebut dengan mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemko.

Pada kesempatan tersebut, Eko Yuyulianda juga menyampaikan penghormatan kepada Wako Fadly yang dinilai sangat peduli terhadap perlindungan pekerja rentan melalui program ULC tahun 2023.

Pertemuan tersebut juga ber-

tujuan mempersiapkan Padang Panjang sebagai kota pertama di Sumatera Barat yang akan menerapkan Universal Labour Coverage (ULC) pada tahun 2023 ini.

Turut hadir, Kepala DPMPTSP, Ewasoska, S.H, dan jajaran. Kemudian, Kepala Cabang BPJS Bukittinggi, Sunjana Achmad beserta rombongan.

(Lala)

Ketua DPRD Padang Panjang Pimpin TSR Kunjungi Masjid Nurul Hidayah



Padang Expo, Padang Panjang Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah, A.Md memimpin Tim Safari Ramadan (TSR) Pemko Padangpanjang, mengunjungi Masjid Nurul Hidayah Koto Panjang, Kamis (14/01/2022).

Dihadapan jamaah dan pengurus masjid, Mardiansyah menyampaikan sejumlah program pembangunan yang dilakukan Pemko Padangpanjang, khususnya program penanganan Covid-19.

"Saat ini, pemerintah sedang menggalakan program vaksinasi anak dan vaksinasi Booster, termasuk juga di Kota Padangpanjang. Alhamdulillah, capaian vaksinasi kita cukup baik, tetapi kita juga meminta kepada masyarakat mematuhi protokol kesehatan," kata politisi Partai amanat Nasional (PAN) itu.

Yeni, salah seorang jamaah Masjid Nurul Hidayah meminta kepada Ketua DPRD dan pemerintah kota, untuk memperhatikan kondisi masyarakat yang tengah dilanda pandemi Covid-19.

"Saya merasakan sendiri, ditengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Salah satunya, sulitnya mendapatkan biaya untuk kuliah anak, apalagi kami-kami yang sudah pensiunan ini," katanya menyampaikan aspirasi kepada tim.

Menjawab itu, Mardiansyah mengakui, bantuan penanggulangan ekonomi nasional, dikhususkan ke-

● Selengkapnya Hal. 7

Ketua DPRD Padang Panjang.....Dari Hal. 1

pada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Persoalan saat ini, yang terdampak bukan hanya yang masuk program PKH dan penerima bansos saja. Tetapi juga cukup banyak yang terdampak, termasuk PNS dan pensiunan," urainya.

Mencarikan solusi yang dialami warga tersebut, lanjut Mard-

iansyah, masyarakat bisa meminta bantuan melalui Bagian Kesra, Baznas maupun melalui program CSR Bank Nagari.

"Pemerintah akan terus memperhatikan masyarakatnya, bagi yang tidak bisa diakomodir melalui program-program bantuan pemerintah pusat, akan diusahakan melalui program yang ada di pemerintah daerah," pesan Mardiansyah.

Selain Ketua DPRD Mardiansyah, Tim 3 juga mengikutsertakan Asisten Administrasi Umum Setdako Martoni, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yan Kasbari, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Ade Nafrita Anas, Kabag Perekonomian Putra Dewangga, Kepala Bank Nagari Zuhendri, Kepala PLN Dedi Yunelson dan sejumlah wartawan. (Lala)



Nama Media : Mingguan Bidik Kasus

Wako Fadly Amran Terima Penghargaan Dari BPJS Ketenagakerjaan

Liputan : Syahril. B (Wartawan BIKAS Padang Panjang / Sumbar)



Pekanbaru - Atas kepedulian memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap 1.261 orang perangkat RT, pekerja sosial masyarakat, tenaga kerja sukarela, pekerja sosial keagamaan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada Pemko Padang Panjang.

Penghargaan itu diserahkan Deputy Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar-Riau, Eko Yuyulianda kepada Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Senin (13/4) di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau di Kota Pekanbaru.

BERSAMBUNG KE HAL ▶ 11

Wako Fadly Amran Terima Penghargaan

Wako Fadly menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dikatakannya, salah satu bentuk keadilan sosial dan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat ialah melalui program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan. "Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu lebih ditingkatkan lagi agar program ini berjalan lebih optimal," kata Wako Fadly.

Tahun 2023, lanjut Fadly,

Pemerintah Kota Padang Panjang akan melindungi seluruh pekerja rentan melalui program Universal Labour Coverage (ULC).

Wako meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) mewujudkan program tersebut dengan mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemko. Pada kesempatan tersebut, Eko Yuyulianda juga menyampaikan penghormatan kepada Wako Fadly yang

dinilai sangat peduli terhadap perlindungan pekerja rentan melalui program ULC tahun 2023.

Pertemuan tersebut juga bertujuan mempersiapkan Padang Panjang sebagai kota pertama di Sumatera Barat yang akan menerapkan Universal Labour Coverage (ULC) pada tahun 2023 ini.

Turut hadir, Kepala DPMPSTP, Ewasoska, S.H, dan jajaran. Kemudian, Kepala Cabang BPJS Bukittinggi, Sunjana Achmad beserta rombongan.

Diketuai Wawako Asrul, Tim II Safari Ramadan Kunjungi Masjid Nurul Huda

Liputan : Syahril. B (Wartawan BIKAS Padang Panjang / Sumbar)

Padang Panjang - Tim II Safari Ramadan yang diketuai Wakil Wali Kota, Drs. Asrul Kunjungi Masjid Jami' Nurul Huda, Kelurahan Silaing Bawah, Kamis (14/4). Pada kunjungan silaturahmi ini, Wawako Asrul menyerahkan bantuan sebesar Rp 20 juta yang diterima pengurus Masjid.

Asrul datang bersama Wakil Komandan Secata B Rindam IBB, Mayor Inf. Indra Yeli, sejumlah pejabat Pemko, anggota DPRD dan unsur terkait lainnya. Asrul mengucapkan terima kasih atas sambutan pengurus dan jamaah Masjid Nurul Huda. Harapannya, kunjungan tim ini dapat mempererat hubungan. "Antara umara, ulama dan masyarakat hendaknya menjalin silaturahmi dan rasa saling memiliki," katanya.

Lebih lanjut, harapannya suasana nyaman dan damai selalu tercipta di Padang Panjang. "Semoga melalui bulan yang penuh rahmat ini, cita-cita Padang Panjang yang bernaung dan bermartabat bisa terwujud," ujarnya.

Dikatakan Asrul, awal Covid-19, umat Islam diuji tantangan tidak bisa melaksanakan Salat Tarawih. Kemudian di tahun 2021 ada kelonggaran. "Sekarang Alhamdulillah dibandingkan tahun sebelumnya, pelaksanaan salat fardu dan Tarawih bisa dilaksanakan lebih ramai. Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah. Bentuk syukur, kita imbau kewajiban memakai masker. Mudah-mudahan menjadi akhir dari wabah ini," ujarnya.

Asrul juga mengimbau masyarakat agar divaksin.



"Kami tidak bosan mengimbau yang belum divaksin untuk segera divaksin. Yakinlah, bila semua telah divaksin, akan ada kekebalan kelompok. Akan membuat kita leluasa beraktivitas dan menjalankan roda perekonomian," sebutnya.

Kemudian, sejumlah program Pemko juga disampaikan Asrul. Di antaranya program guru dan murid juara,

menjaga daya beli masyarakat dengan program BLT minyak goreng dan PKH. Selanjutnya, Pemko memfasilitasi program pelatihan kepada para pencari kerja melalui DPMPSTP, adanya bantuan pokir melalui anggota dewan di tingkat Provinsi Sumbar dan Kota Padang Panjang. Kemudian penanggulangan kemiskinan melalui program Baznas.

KLIPING BERITA



Kominfo Padang Panjang



Jalan Prof. M. Yamin Nomor 2



diskominfo.padangpanjang@gmail.com